



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 15 Februari 2019

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/265/SETDAKAB.BKPP

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP I KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2019

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian yang diundangkan pada tanggal 12 Februari. Serta untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/327/FP3K/M.SM.01.00/2019 Tanggal 4 Februari Perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019. maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEBUTUHAN FORMASI PPPK TAHAP I

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan melakukan penerimaan PPPK Tahap I yaitu dikhususkan bagi pemenuhan kebutuhan ASN yang bersifat mendesak yang terdiri dari Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian **dari Tenaga Honorer Eks Kategori Dua (TH Eks K-II) yang ada dalam database BKN**;
2. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan pemetaan terhadap data TH Eks K-II yang dianggap dapat mendaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejumlah 114 orang, terdiri dari:
 - a. Tenaga Guru jumlah **107 orang**, dengan ketentuan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini;
 - b. Tenaga Kesehatan jumlah **1 orang**, dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (*bukan STR internship*) kecuali untuk epidemiologi, entomolog, Administrator Kesehatan, dan pranata laboratorium kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan
 - c. Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK Bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi dibidang pertanian. Adapun jumlah yang akan diterima adalah **6 orang**, dengan rincian:
 - 1) Penyuluh pertanian berasal dari TH Eks K-II sejumlah 2 Orang
 - 2) Penyuluh pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah sejumlah 4 Orang;

B. PERSYARATAN UMUM

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PPPK (Tahap I) adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 20 (Dua Puluh) Tahun dan 1 Tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;
2. Bahwa peserta yang telah melakukan pendaftaran, akan mendapatkan nomor registrasi yang akan digunakan untuk seleksi administrasi;
3. Setelah melakukan pendaftaran secara online, pelamar menyampaikan dokumen kepada Panitia Instansi berupa:
 - 1) Bukti registrasi
 - 2) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, ditulis tangan menggunakan tinta warna hitam pada kertas bergaris. (Lampiran 1);
 - 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 4) Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 5) Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai (khusus bagi tenaga guru ditambah akta mengajar);
 - 6) Surat keterangan masih aktif bekerja dari pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 7) Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku (khusus bagi tenaga kesehatan);
 - 8) Pasfoto terbaru warna latar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 Lembar;
 - 9) Foto Copy Kartu Peserta Ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
 - 10) Surat Pernyataan bermaterai 6000 (Lampiran 2)
4. Pendaftaran dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal <https://sscASN.bkn.go.id> atau portal lainnya yang ditetapkan oleh BKN.
5. Seluruh berkas foto copy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Masing-masing berkas lamaran dimasukkan dalam stop map sebanyak 2 (dua) Rangkap sesuai tingkat kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - Tenaga Guru warna Hijau
 - Tenaga kesehatan warna Biru
 - Tenaga penyuluh Pertanian warna merah
7. Berkas disampaikan langsung pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan alamat Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Desa Boroko Kecamatan Kaidipang paling lambat tanggal **22 Februari 2019 Jam Kerja**.

D. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap I Tahun 2019 *tidak dipungut biaya*
2. Hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tes akan diumumkan kemudian;
3. Kepada pelamar agar pro aktif memantau perkembangan informasi tentang pelaksanaan seleksi pada Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolaang Mongondow Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



CONTOH PERMOHONAN UNTUK EKS KATEGORI II

BOROKO, FEBRUARI 2019

KEPADA

PERIHAL : PERMOHONAN

YTH. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
DI -

BOROKO

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

| | |
|-----------------------------|---|
| NAMA | : |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : |
| JENIS KELAMIN | : |
| AGAMA | : |
| PENDIDIKAN TERAKHIR/JURUSAN | : |
| ALAMAT/KODE POS | : |
| ALAMAT E-MAIL | : |
| NOMOR TELEPON/HP | : |

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK KIRANYA SAYA DAPAT MENGIKUTI SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

1. BUKTI REGISTRASI
2. FOTO COPY KTP (DILEGALISIR)
3. FOTO COPY KARTU KELUARGA (DILEGALISIR)
4. FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR DAN TRANSKRIP NILAI / AKTA MENGAJAR (DILEGALISIR)
5. SURAT KETERANGAN MASIH AKTIF BEKERJA DARI PEJABAT YANG BERWENANG
6. SURAT TANDA REGISTRASI YANG MASIH BERLAKU (Khusus Bagi Tenaga Kesehatan)
7. FOTO COPY KARTU PESERTA UJIAN TENAGA HONORER KATEGORI II TAHUN 2013
8. KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI PPPK TAHUN 2019
9. SURAT PERNYATAAN
10. PAS FOTO TERBARU WARNA LATAR MERAH UKURAN 3 X 4 cm SEBANYAK 4 (Empat) LEMBAR

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERTIMBANGAKAN, ATASNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

Yang Bermohon

.....

CATATAN :

1. Surat Permohonan ditulis tangan, huruf balok dan menggunakan tinta hitam tanpa meterai diatas kertas Folio bergaris.
2. tulis nama di belakang Pas foto

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA (TERMASUK BUMN ATAU BUMD);
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH. DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

....., 2019
YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

CATATAN :

SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN, HURUF BALOK DAN MENGGUNAKAN TINTA HITAM BERMETERAI DIATAS KERTAS FOLIO BERGARIS.